

OPTIMALISASI PERAN SATKOWIL MELALUI BINTER DALAM MEMBANTU PEMERINTAH MENGAMANKAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI GUNA MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN

H. Rumadi

Dosen Ilmu Administrasi Stisospol ‘Waskita Dharma’ Malang

ABSTRAK

Pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi sebagai salah satu metoda Binter merupakan pelibatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara dalam membantu penyelenggaraan kegiatan petani dalam mewujudkan swasembada pangan atas permintaan instansi terkait dan atau inisiatif sendiri yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait dan masyarakat tanpa mengabaikan kesiapan satuan. Disamping itu Pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh TNI AD. Komando Kewilayahan sebagai ujung tombak TNI AD dalam melaksanakan pembinaan teritorial melalui pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi yang implementasinya di lapangan ditujukan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dalam lingkup internal TNI AD sendiri melalui Bakti TNI diharapkan akan terwujud kemanungan TNI – Rakyat.

Implementasi di lapangan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dimana Kowil menjadi tulang punggung dalam pelaksanaannya pada kenyataannya belum mencapai hasil sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan, mengingat Kowil masih menghadapi berbagai permasalahan yang menyangkut kesiapan aparatur Kowil yang belum memadai, penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dalam setiap tahapan yang belum sesuai dengan ketentuan, tidak adanya dukungan sarana serta belum maksimalnya kegiatan koordinasi lintas sektoral yang dilakukan aparat Kowil dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.

Pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan sarana yang efektif untuk mendukung swasembada pangan, sehingga penyelenggaraannya perlu lebih dioptimalkan. Oleh karena itu guna terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat di masa yang akan datang, rumusan upaya dan langkah-langkah pengembangan yang menyangkut peningkatan kesiapan aparatur Kowil, penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dalam setiap tahapan, serta peningkatan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bakti TNI dengan Pemerintah dan instansi sektoral lainnya melalui kerjasama lintas sektoral TNI dengan Departemen/Non Departemen mutlak untuk dapat dilakukan, sehingga kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi sebagai upaya TNI AD untuk membantu pemerintah.

Kata kunci: peran satkowil melalui binter, pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi, swasembada pangan

PENDAHULUAN

Satkowil sebagai satuan jajaran TNI AD yang sudah tergelar diseluruh wilayah dan mempunyai tugas untuk

melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, dalam rangka mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang serta kemanungan TNI-Rakyat yang

tangguh untuk kepentingan pertahanan negara. Salah satu kegiatan dalam menunjang tercapainya tugas pokok dalam pemberdayaan wilayah daratan tersebut, adalah dilaksanakannya Binter sebagai upaya terciptanya Kemanunggalan TNI-Rakyat untuk didayagunakan bagi kepentingan Pertahanan negara Matra Darat. Salah satu tugasnya adalah membantu pemerintah mengamankan pendistribusian pupuk bersubsidi bagi para petani dari berbagai macam penyelewengan yang terjadi agar swasembada pangan dapat terwujud.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian adalah pupuk. Pemerintah berkepentingan melakukan berbagai deregulasi kebijakan di bidang pupuk dengan maksud agar terwujud iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan tersebut antara lain pemberian subsidi harga pupuk bagi petani. Namun dalam pelaksanaan pendistribusian ini banyak menemui hambatan diantaranya ditemukan indikasi penjualan pupuk dengan harga diatas HET (Harga Eceran Tertinggi), penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK, tidak dipasangnya spanduk pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan DO, keterlambatan distribusi, kelangkaan, pengantian kemasan, penimbunan, penjualan di luar wilayah distribusi, dan terdapat pengecer yang tidak resmi.

Dalam kenyataannya pendistribusian pupuk yang dilaksanakan ini menuntut peranan TNI berpartisipasi dalam pendistribusian pupuk subsidi kepada petani. Hal ini diharapkan menjadi wujud nyata dan komitmen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam hal ini melalui binter untuk mengawal pendistribusian pupuk kepada petani sehingga tepat sasaran dengan tujuan akhir terwujudnya swasembada pangan. Namun dalam pelaksanaanya

masih banyak menemui kendala dan keterbatasan antara lain rendahnya tingkat kesiapan aparat Binter, terbatasnya sarana dan yang dimiliki dalam pendampingan, serta masih belum padunya rencana kegiatan pengawalan pendistribusian ini dengan pemerintah dan instansi terkait lainnya. Kondisi tersebut berakibat pada pengawalan pendistribusian pupuk yang dilaksanakan belum optimal dan tidak dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan Komando atas, sehingga tugas pemberdayaan wilayah pertahanan darat dalam memantapkan swasembada pangan yang menjadi salah satu tugas TNI AD belum dapat tercapai.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka perlu disusun berbagai langkah dan upaya mengoptimalkan peningkatan kesiapan aparat Binter Dalam Membantu Pemerintah Mengamankan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Guna Mewujudkan Swasembada Pangan, peningkatan sarana pengamanan pendistribusian maupun peningkatan keterpaduan penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya sehingga diharapkan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan darat dapat terwujud.

Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Maksud tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang optimalisasi peran aparat Binter Dalam Membantu Pemerintah Mengamankan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Guna Mewujudkan Swasembada Pangan.

b. **Tujuan.** Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai bahan masukan dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan TNI AD dalam pengambilan kebijaksanaan dan strategi optimalisasi kesiapan peran aparat Binter Dalam Membantu Pemerintah Mengamankan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Guna Mewujudkan Swasembada Pangan sehingga dalam penyelenggaranya dapat berjalan optimal.

Metoda dan Pendekatan. Karangan militer ini ditulis dengan menggunakan metode analisis dekritif serta melalui pendekatan empiris dan studi kepustakaan.

Pengertian

a. **Optimalisasi.** Suatu upaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari keadaan semula.¹

b. **Satcowil.** Satcowil adalah seluruh satuan jajaran TNI AD yang sudah tergelar diseluruh wilayah dan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, dalam rangka mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang serta kemanunggalan TNI-Rakyat yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara.²

c. **Kowil** (Komando Kewilayahan) adalah badan Komando kewilayahan sebagai penyelenggara Binter yang disusun secara vertikal mulai dari tingkat Kodam, Korem, Kodim sampai tingkat Koramil.³

d. **Binter.** Pembinaan Teritorial merupakan suatu system pembinaan yang khas bagi TNI yang digali dari pengalaman perjuangan bersenjata maupun pengalaman dalam turut menegakkan konstitusi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kebenaran dari Pembinaan Teritorial dalam perjuangan TNI telah teruji melalui berbagai peristiwa dalam lingkup nasional maupun sektoral yang bercorak kewilayahan dan digunakan untuk mengelola potensi kewilayahan meliputi Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial untuk kepentingan Pembinaan Teritorial.

e. **Pupuk Bersubsidi.** Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV (Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/ PER/2/2009 tentang

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Berubsidi untuk sektor Pertanian).⁴

Dasar Pemikiran

a. **Urgensi Pentingnya Peran Binter dalam Pengamanan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Guna Mewujudkan Swasembada Pangan.** Binter dalam metode Bakti TNI pada intinya adalah merebut hati rakyat, oleh setiap prajurit Angkatan Darat dengan bersikap dan berperilaku baik terhadap rakyat dengan tujuan mengambil hati rakyat sehingga tumbuh simpati dan cinta terhadap tentaranya, yaitu Angkatan Darat guna mendorong terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat, suatu kondisi yang melahirkan kekuatan sinergis yang sangat diperlukan bagi upaya-upaya menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Semangat kemanunggalan TNI dan Rakyat itu memang harus dipertahankan dan bahkan harus terus dipupuk serta ditumbuhkembangkan dalam hati sanubari setiap prajurit TNI AD dan senantiasa akan menempatkan hati nurani rakyat pada tempat yang sentral dan suara hatinya kita dengarkan dengan baik. Dengan demikian, maka Peran Binter dalam Pengamanan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Guna Mewujudkan Swasembada Pangan sebagai upaya TNI AD untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan khususnya dalam hal pendistribusian pupuk bersubsidi bagi para petani yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kemanunggalan TNI – Rakyat.

b. **Pupuk Bersubsidi Guna Mewujudkan Swasembada Pangan.** Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. Atas dasar tersebut guna meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang maka pemerintah memberikan subsidi pupuk. Namun

¹ Yandianto, Drs. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, penerbit M2S Bandung, September 2001, Hal 393.

² Keputusan Danpusdikter, VI/2003

³ Buku Petunjuk Induk tentang Binter Nomor Skep/98/V/2007 tgl 16 Mei tahun 2007.

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/ PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Berubsidi untuk sektor Pertanian

beragam modus penyalahgunaan pupuk yang ada pada intinya bermotif untuk mengambil keuntungan, diantaranya dengan menimbun pupuk bersubsidi di sebuah gudang. Ketika mulai terjadi kelangkaan di lapangan, oknum distributor atau agen mengeluarkan pupuk itu lalu menjualnya dengan harga nonsubsidi, lalu adanya agen yang menjual pupuk bersubsidi namun tanpa dilengkapi surat izin resmi, oknum distributor atau pengoplos yang memborong pupuk urea bersubsidi lalu mengganti kemasannya dengan nonsubsidi ukuran 50 kilogram, menaikkan harga pupuk, dan mengoplos pupuk bersubsidi dengan bahan-bahan kimia tertentu untuk mengubah warna pupuk. Namun ada juga oknum yang mengoplos pupuk bersubsidi dengan nonsubsidi secara langsung alias tanpa campuran bahan kimia. Hal ini dapat menyebabkan swasembada beras yang dicanangkan oleh pemerintah di tahun 2016 terancama gagal, jika pemerintah tidak segera menuntaskan persoalan pupuk yang selama ini masih terjadi. Untuk itu pemerintah dan TNI dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat agar pupuk bersubsidi itu benar-benar sampai di tangan petani yang berhak menerimanya dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

PEMBAHASAN

Peran Binter Dalam Mengamankan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Saat Ini

TNI merasa terpanggil untuk ikut berperan serta dalam mengamankan pendistribusian pupuk bersubsidi bagi petani, sehingga swasembada pangan dapat terwujud. Implementasi di lapangan dalam melakukan hal tersebut, TNI menerapkan pendekatan pembinaan teritorial dengan menjadikan aparat binter terdepan sebagai tulang punggung dalam pelaksanaannya. Namun hasil yang dicapai selama ini belum sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan, mengingat penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan mulai dari tahap

perencanaan sampai dengan tahap akhir serta kurangnya dukungan sarana sehingga kegiatan koordinasi lintas sektoral yang dilakukan aparat Kowil dalam hal ini binter terdepan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya tidak optimal.

Pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pencapaian swasembada pangan. Pelaksanaan Bakti TNI yang dilakukan oleh Satuan Kowil melalui peran binternya saat ini dirasakan masih kurang optimal.

a. Tahap Perencanaan. Pada tahap perencanaan perlu diketahui subyek, obyek, metode dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga tersusun dengan cermat namun saat ini belum dapat dilaksanakan terutama pada pelaksanaan kegiatan baik kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik dikarenakan pada perencanaan sasaran belum dilaksanakan seobyektif mungkin dengan memilih sasaran tidak melalui pengkajian yang mendalam dari aspek kesejahteraan petani melainkan hanya memilih sasaran yang dapat dilaksanakan dengan waktu dan kemampuan yang tersedia.

b. Tahap Persiapan. Tahap persiapan seharusnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan namun saat ini persiapan untuk pelaksanaan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dilaksanakan secara mendadak setelah adanya penyelewangan pendistribusian pupuk bersubsidi yang terbongkar sehingga kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada persiapan tidak dilaksanakan diataranya :

- 1) Rapat koordinasi yang seharusnya dilaksanakan ditingkat pusat oleh Dandim yang daerahnya ditetapkan menjadi obyek sasaran tidak dilaksanakan tetapi hanya menerima petunjuk agar mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan secara mendadak.
- 2) Penyiapan administrasi kegiatan tidak tersusun dengan baik meliputi sarana, perintah operasi, dan

dukungan administrasi tidak optimal.

c. Tahap Pelaksanaan. Program pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi didalam pelaksanaannya terdapat keterbatasan terutama dalam hal dukungan anggaran yang diberikan oleh Komando Atas sangat kecil, bahkan ada kegiatan program yang tidak didukung oleh anggaran sama sekali. Dinamika dilapangan dirasakan adanya banyak hambatan dan kendala yang harus diatasi agar sasaran dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Keterbatasan dukungan yang ada, mengakibatkan Kowil sering bersandar kepada Pemda dan instansi yang terkait, agar kegiatan tersebut dapat berjalan. Hal ini sering mengalami hambatan karena adanya keterbatasan Pemda dan instansi terkait serta tidak adanya instruksi/petunjuk dari pusat terhadap kegiatan yang sifatnya lintas Kementerian. Kendala yang ada pada pelaksanaan kegiatan menyebabkan beberapa permasalahan yaitu:

1) Pencapaian target pada pelaksanaan belum sesuai dengan yang diharapkan karena dukungan administrasi yang ada tidak sesuai dengan beban pekerjaan dilapangan.

2) Dalam rangka mengatasi pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi ini, satuan tidak memiliki peralatan penunjang seperti alat transportasi dan komunikasi khusus untuk hal ini, sehingga belum dapat melaksanakan secara cepat, karena harus melaksanakan koordinasi dengan pihak lain baik swasta maupun pemerintah untuk dapat memberikan bantuan peralatan tersebut. Selain itu dihadapkan dengan daerah yang terpencil atau sulit untuk dijangkau dengan peralatan tersebut menjadi kendala yang sulit dihindari.

3) Satuan TNI yang bertugas melaksanakan pemanenan pendistribusian pupuk bersubsidi belum dilengkapi dengan sistem administrasi dan pengorganisasian yang khusus disiapkan untuk melaksanakan seperti data rencana kebutuhan pupuk

petani/kelompok tani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sehingga dalam pelaksanaannya kurang optimal.

4) Belum tertatanya program kegiatan penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi, sehingga sasaran yang dicapai kadang-kadang tidak sesuai dengan skala prioritas.

5) Dalam penyelenggaraan kegiatan, Aparat teritorial kurang mengadakan koordinasi dengan masyarakat setempat maupun pemerintah dan instansi terkait, sehingga terkesan bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat menganggap bahwa hal tersebut hanya semata tugas aparat.

d. Tahap Akhir Pelaksanaan. Hasil yang telah dicapai pada pelaksanaan pengamanan distribusi pupuk bersubsidi ini terkesan manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama karena kurangnya tanggungjawab pemerintah daerah terhadap hasil kegiatan yang dilakukan serta tidak adanya upaya dari aparat Kowil untuk mengimbau Pemda agar dilaksanakan peningkatan kualitas terhadap hasil kegiatan yang dilaksanakan

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan merupakan pendukung yang sangat penting bagi aparat Komando Kewilayahan dan anggota TNI AD yang lainnya dalam melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial termasuk dalam menyelenggarakan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi, sehingga apa yang dikerjakan tetap pada jalurnya dan tidak menyimpang dari tujuan semula. Saat ini masalah sarana dan prasarana di bidang pembinaan teritorial yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dirasakan perlu segera dilakukan pembenahan sebagai berikut :

a. Secara Kualitas.

1) Secara konseptual sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan pengamanan distribusi

- pupuk bersubsidi adalah sarana yang telah ada bukan sarana atau prasarana tambahan yang diberikan khusus untuk penyelenggaraan kegiatan ini.
- 2) Keterbatasan sarana ini tentunya kurang mendukung percepatan pencapaian kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi itu sendiri.

b. Secara Kuantitas. Koramil selaku Komando Kewilayahan terdepan, umumnya belum mempunyai sarana yang mencukupi sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Sarana dan Prasarana yang lebih komplit biasanya hanya di markas Kodim dan Koramil-Koramil kota, sedang Koramil-Koramil pedalaman sarana yang dimilikinya sangat terbatas. Kondisi demikian sangat tidak menguntungkan bagi Komando Kewilayahan dalam menyelenggarakan Binter karena bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan di lapangan, dan dari segi pembinaan SDM bagi aparat Komando Kewilayahan tidak akan profesional.

Keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan TNI dengan Pemerintah daerah belum maksimal, karena kerjasama dan koordinasi yang dilakukan antara TNI dengan pemerintah daerah dan instansi sektoral dalam penyelenggaraan pengamanan pupuk bersubsidi ini belum optimal. Hal ini tampak dari munculnya permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Kerjasama antara Pemerintah dengan TNI belum terlaksana dengan baik, karena masih adanya keragu-raguan dalam mengambil keputusan, akibat dari belum adanya kebijakan yang mengatur secara jelas dan rinci tentang batas-batas kewenangan masing-masing..
- b. Penentuan obyek yang akan dijadikan sasaran di lapangan belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh TNI.
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan data rencana kebutuhan pupuk petani/kelompok tani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

(RDKK) antara pemerintah daerah dengan Satuan Komando Kewilayahan belum berjalan dengan baik yang mana penyusunan data rencana kebutuhan pupuk petani/kelompok tani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) belum terkoordinasi akan menyulitkan kedua belah pihak.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH

Faktor Internal

a. Kekuatan

1) Kowil jajaran TNI AD dari tingkat Kodam sampai dengan Babinsa telah tergelar sampai ke pelosok daerah memungkinkan bagi setiap aparat Kowil untuk lebih mengenal daerahnya masing-masing dan dapat memantau terhadap segala kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga bila ditemukan adanya kekurangan maka dapat dijadikan sebagai salah satu obyek penyelenggaraan Pengamanan Pendistribusian pupuk bersubsidi.

2) Tingkat pengalaman aparat Kowil dalam penyelenggaraan Pengamanan Pendistribusian pupuk bersubsidi sudah cukup memadai, mengingat setiap satuan Kowil telah menyusun dan melaksanakan kegiatan Program Bakti TNI secara terencana dan menjadi rutinitas memungkinkan setiap aparat untuk mengetahui berbagai hambatan yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan Bakti TNI dalam hal ini adalah penyelenggaraan Pengamanan Pendistribusian pupuk bersubsidi, sehingga kegiatan evaluasi guna perbaikan penyelenggaraan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

3) Daya gerak yang ditopang dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi dan kondisi fisik yang prima dari aparat Kowil hasil binaan dari latihan yang dilaksanakan secara teratur di satuan merupakan kekuatan yang harus dapat diberdayakan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pengamanan Pendistribusian pupuk bersubsidi.

4) Penyusunan program kerja satuan Kowil didasarkan pada sistem “bottom up planning”, dimana Komando atas menyerap kebutuhan satuan yang ada di bawahnya merupakan kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Kowil untuk menyusun program kegiatan Pengamanan Pendistribusian pupuk bersubsidi guna mendapatkan persetujuan dari komando atas sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan Pengamanan Pendistribusian pupuk bersubsidi yang akan dilaksanakan Kowil.

b. Kelemahan

1) Sikap dan perilaku oknum aparat Kowil yang masih belum sepenuhnya mencerminkan jati dirinya sebagai prajurit TNI, karena masih timbul adanya arrogansi aparat yang cenderung menimbulkan sikap antipati dari sebagian masyarakat terhadap TNI sehingga berpengaruh pada dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengamanan Pendistribusian pupuk bersubsidi.

2) Alat peralatan yang dimiliki oleh satuan Kowil sebagai alat penunjang penyelenggaraan Bakti TNI sangat terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas berakibat pada kegiatan dilaksanakan seadanya dan dalam kondisi serba kekurangan berpengaruh pada pencapaian sasaran kegiatan Pengamanan Pendistribusian pupuk bersubsidi yang tidak maksimal.

Faktor Eksternal

a. Peluang

1) Tugas-tugas TNI dalam OMSP sesuai dengan UU RI No.34 tahun 2004 tentang TNI diantaranya adalah menyelenggarakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang salah satu penjabarannya dilaksanakan ke dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan Bakti TNI, maka program Pengamanan Pendistribusian pupuk bersubsidi memiliki payung hukum yang jelas sehingga tidak akan menimbulkan resistensi di tengah-tengah masyarakat.

2) Guna menghadapi kompleksitas permasalahan dan intensitas penugasan yang sangat tinggi dihadapkan kepada keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi, maka unsur pimpinan TNI AD telah menentukan prioritas sasaran dimana untuk Pengamanan Pendistribusian pupuk bersubsidi memungkinkan bagi Satuan Kowil untuk mendapatkan dukungan Komando atas terhadap setiap program yang akan digelar di daerahnya.

3) Penerimaan masyarakat dan instansi sektoral lainnya yang terkait di daerah terhadap hasil-hasil kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi cukup besar dan telah dirasakan manfaat sepenuhnya bagi rakyat, memungkinkan bagi aparat Kowil untuk mendapatkan bantuan baik tenaga, dana maupun alat peralatan yang dibutuhkan untuk memperlancar penyelenggaraan pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilaksanakan Kowil.

4) Besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah terutama kekayaan alamnya merupakan peluang yang besar untuk dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat dan swasembada pangan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan pendistribusian pupuk bersubsidi , sehingga pemberdayaan wilayah pertahanan pada aspek sumber kekayaan alam dalam hal ini pertanian dapat tercapai optimal.

c. Kendala

1) Sosialisasi kebijakan pemerintah yang menyangkut dukungan anggaran bagi kegiatan pendistribusian pupuk bersubsidi belum dilaksanakan secara menyeluruh sampai pada tingkat daerah Kabupaten, sehingga sering timbul adanya kesalahfahaman antara satuan Kowil yang akan melaksanakan pendistribusian pupuk bersubsidi di daerah dengan instansi pemerintah di daerah yang berpengaruh pada kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendistribusian pupuk bersubsidi.

2) Kemampuan daya dukung daerah baik berupa dana, alat peralatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tidak sama, sehingga berpengaruh pada pemenuhan dukungan alat peralatan dan sarana penunjang kegiatan pendistribusian pupuk bersubsidi lainnya.

3) Belum sinkronnya program Binter yang disusun oleh Kowil dengan program Pemda terutama menyangkut penyelenggaraan pendistribusian pupuk bersubsidi sebagai akibat koordinasi yang belum terpadu antara Pemda dengan Kowil berdampak pada operasionalisasi kegiatan di lapangan menjadi tumpang tindih, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal.

Optimalisasi Peran Binter dalam Mengamankan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terus menerus oleh TNI – AD dan segenap komponen bangsa lainnya, agar Swasembada pangan dapat terwujud. Pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi sebagai salah satu metode Pembinaan Teritorial merupakan sarana yang efektif untuk mendukung tugas pemberdayaan wilayah pertahanan darat, sehingga penyelenggarannya perlu lebih dioptimalkan. Oleh karena itu guna terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat di masa yang akan datang maupun swasembada pangan, perlu dirumuskan berbagai upaya dan langkah-langkah pengembangan yang menyangkut peningkatan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dalam setiap tahapan, seperti peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Bakti TNI dengan Pemerintah dan instansi sektoral lainnya melalui kerjasama lintas sektoral TNI dengan Kementrian/Non Kementrian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam perumusan optimalisasi penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi ini adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kegiatan pada setiap tahapan dalam menyelenggarakan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi secara optimal sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan darat di daerah.
- c. Mewujudkan suatu keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan Pemerintah dan instansi sektoral lainnya.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terwujudnya pelaksanaan setiap tahapan yang baik dan optimal dalam menyelenggarakan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.
- b. Terselenggaranya tahapan-tahapan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi secara optimal sehingga dapat mendukung swasembada pangan di daerah.
- c. Terwujudnya kerjasama lintas sektoral TNI dengan Pemerintah daerah dan dengan Kementrian/Non Kementrian sehingga dapat menjamin adanya keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

Subyek.

a. Kasad

- 1) Mengeluarkan kebijakan program pembangunan dan pembinaan bagi Satuan Kowil dalam rangka

peningkatan profesionalisme Aparat Kowil.

2) Menyusun program pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi yang ditujukan untuk memperkokoh kemanunggalan TNI-Rakyat serta terwujudnya swasembada pangan.

b. Pangdam

Dalam Pengembangan rencana operasi pertahanan (Renopshan) Kodam, maka Pangdam memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1) Bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penentuan terhadap kebijaksanaan menyangkut penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayahnya.

2) Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait di tingkat Provinsi sehingga mempunyai kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.

3) Mengkoordinasikan dengan pejabat Muspida dan instansi terkait serta tokoh masyarakat di tingkat propinsi agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

4) Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayah sehingga tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan.

c. Danrem

1) Danrem dalam menyusun Rencana pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan Rencana dan Program Kodam sebagai Konsep dasar bagi penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

2) Danrem membantu Pangdam dan sebagai perantara dalam mengkoordinasikan dengan pejabat Muspida dan instansi terkait serta tokoh masyarakat di tingkat propinsi dengan pejabat Muspida dan instansi terkait serta tokoh masyarakat di tingkat kabupaten yang ada di wilayahnya agar dapat mendukung kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

3) Menghimpun, mengklasifikasi data geografi, demografi, kondisi sosial dari tiap – tiap Kodim terkait pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

4) Mensinergikan kekuatan dan kemampuan yang ada dari Kodim jajarannya meliputi personel dan materiil sehingga mampu diberdayagunakan untuk penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

d. Dandim. Dandim merupakan Komandan satuan kewilayahan yang bertanggung jawab secara langsung dalam membina dan meningkatkan kepampuan prajuritnya agar dapat melaksanakan tugasnya termasuk dalam menyelenggarakan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.

1) Mengkoordinasikan dengan pejabat Muspida dan instansi terkait serta tokoh masyarakat secara terus menerus di tingkat kabupaten dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

2) Menyiapkan, melatih dan meningkatkan kemampuan anggotanya agar siap ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

3) Menyiapkan perlengkapan dan materiil yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

4) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi untuk menyiapkan daya tangkal dan kemampuan perlawanan wilayah serta meningkatkan kemanunggalan antara TNI-Rakyat.

5) Membuat laporan secara periodik setiap bulan, triwulan, semestari dan tahunan kepada Danrem.

Obyek.

a. Personel. Aparat Kowil sebagai Sumber daya manusianya yang senantiasa harus meningkatkan

keterampilan maupun pengetahuannya di bidang teritorial, sehingga dapat memadukan kegiatan Binter dan melaksanakan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi secara optimal.

b. Materiil. Sebagai komponen pendukung baik alat komunikasi, alat peralatan maupun kendaraan yang perlu senantiasa ada untuk mendukung penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilaksanakan Kowil.

Metoda.

a. Koordinasi. Koordinasi merupakan metoda yang digunakan untuk menjamin terwujudnya suatu kerjasama dan kesamaan visi dan persepsi sehingga tercapai suatu sinergi yang positif dari masing-masing instansi terkait baik TNI maupun instansi lintas sektoral dalam penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

b. Pengawasan dan Evaluasi. Pengawasan dan evaluasi merupakan metoda yang digunakan untuk menjamin bahwa kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi yang diselenggarakan oleh Kowil sesuai dengan perencanaan yang telah tersusun, serta melalui evaluasi dapat menjamin adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam menyelenggarakan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

c. Pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi Aparat Kowil melalui pembekalan ilmu pengetahuan bidang teritorial sehingga dapat mendukung terselenggaranya kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

d. Latihan. Latihan merupakan metoda untuk meningkatkan keterampilan aparat Kowil yang dilaksanakan secara berjenjang, bertahap dan berkesinambungan di satuan sehingga memiliki kesiapan operasional yang tinggi dalam

melaksanakan tugas pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

e. Regulasi. Regulasi ini berkaitan dengan upaya melakukan penataan terhadap piranti lunak baik berupa aturan/tatanan hukum seperti per-Undang-Undangan maupun buku-buku petunjuk dan Protap yang diperlukan oleh Kodim untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

Sarana dan Prasarana.

a. Sarana.

1) Piranti lunak yang berisikan doktrin, peraturan, prosedur tetap, buku petunjuk dan buku lainnya yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

2) Alat Peralatan. Alat peralatan seperti Alat Komunikasi yang dapat digunakan baik milik organik TNI, Pemda, swasta dan milik masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan dan koordinasi dalam pelaksanaan dan pelaporan sehingga kegiatan dapat berjalan lancar, serta Alat Angkutan dan alat peralatan lainnya untuk mendukung kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

3) Anggaran berupa pemenuhan alokasi dana dari Komando atas untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan yang diperlukan dalam operasionalisasi kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat yang dilaksanakan oleh Satuan Kowil.

b. Prasarana

1) Bangunan perkantoran berupa kantor Kodim, Koramil dan kantor Pemda serta kantor instansi terkait.

Upaya yang Dilaksanakan

a. Optimalisasi Penyelenggaraan Pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi. Pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi sebagai salah satu metode Binter dilaksanakan secara terus menerus guna terwujudnya Kemanunggalan TNI – Rakyat serta swasembada pangan. Agar

penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada kegiatan pentahapan yang diawali dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir.

1) Tahap Perencanaan.

a) Pada tahapan pemilihan sasaran dalam kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi yang digabungkan dan dikembangkan dengan Program Kementerian/Non Kementerian, rencana anggaran dirumuskan secara terpadu dengan unsur-unsur yang terkait serta mempertimbangkan keinginan dan kepentingan masyarakat.

b) Pada tingkat Pusat, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Non Kementerian dalam menyusun perencanaan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi, agar program-program Kementerian/Non Kementerian yang dapat dipadukan dengan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi untuk satu tahun ke depan dapat diprogramkan dimasing-masing Kementerian/Non Kementerian.

2) Tahap Persiapan. Tahap persiapan dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan kegiatan.

a) Rapat Koordinasi Teknis tingkat Pusat. Dandim yang daerahnya ditetapkan menjadi obyek sasaran pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di tingkat Pusat dalam rangka membahas rencana kegiatan sasaran secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait.

b) Menyiapkan Personel yang terlibat dalam Satuan Tugas. Dandim menyusun personel yang terlibat dalam nominatif Satuan Tugas sesuai kemampuan satuan, instansi dan bidang tugas.

c) **Tahap Pelaksanaan.** Pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi yang

selama ini telah dilaksanakan pada akhirnya menjadikan rutinitas biasa dan belum menampakkan hasil yang signifikan.

d) Tahap Akhir. Untuk dapat menjamin kesempurnaan pelaksanaan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi perlu dilaksanakan tahap purna manunggal dengan kegiatan pembuatan laporan, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan hasil kegiatan.

b. Penyusunan dan revisi Aturan/tatanan hukum tentang penyelenggaraan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi. Untuk memberikan pemahaman kepada aparat Kowil tentang aturan-aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 tentang kewajiban bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka perlu diadakan kegiatan pengadaan buku-buku petunjuk lapangan dan teknis pelaksanaan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

c. Peningkatan Keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan Pemerintah. Agar kerjasama antara Pemerintah dengan TNI dapat terlaksana dengan baik, serta didukung oleh adanya kebijakan atau sarana dan aturan yang mengatur secara jelas dan rinci tentang batas-batas kewenangan masing-masing sehingga keragu-raguan dalam mengambil keputusan dapat teratasi.

PENUTUP

Kesimpulan

a. Kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan salah satu metode yang dinilai efektif untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat, serta dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Namun dalam

implementasinya karena pelaksanaan setiap tahapan pada kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi belum dilaksanakan secara, piranti lunak belum lengkap, serta Keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan pemerintah daerah belum maksimal.

b. Agar penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi mampu mencapai hasil yang optimal maka perlu ditempuh langkah optimalisasi dengan meningkatkan kegiatan pada setiap tahapan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi, latihan dan penataran, penyamaan visi dan misi tentang penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi, serta peningkatan kerjasama antara aparat Kowil dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya dengan harapan melalui pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dapat mencapai sasaran yang telah disusun yakni terwujudnya kemanunggalan TNI dengan rakyat serta swasembada pangan

c. Dengan adanya upaya ke arah yang lebih baik dengan berbagai langkah yang disesuaikan dengan aturan dan norma yang diberlakukan, baik terhadap peran dan fungsi dari Kowil itu sendiri melalui penyamaan visi, misi dan persepsi, maupun kinerja Aparat Kowil melalui peningkatan lima kemampuan teritorial serta kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilaksanakan pada intinya adalah untuk merebut hati rakyat dengan bersikap dan berperilaku baik terhadap rakyat sehingga timbul simpati rakyat terhadap TNI sehingga mendorong terwujudnya Kemanunggalan TNI-Rakyat serta terwujudnya swasembada pangan.

Saran

a. Perlu adanya peningkatan kegiatan pada setiap tahapan pada pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi sehingga tersusun dengan

cermat sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

b. Perlu adanya kegiatan pendidikan, latihan dan penataran yang dilaksanakan di satuan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan bagi aparat Kowil yang menyangkut materi pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Petunjuk Induk tentang Binter Nomor Skep/98/V/2007.
Kementerian Pertanian RI. 2004.

*Perencanaan Program
Ketahanan Pangan di Indonesia.*
www.kompas.com. Di akses, 12 November 2014.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/ PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Berubsidi untuk sektor Pertanian.

Undang-undang RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-undang RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

Yandianto, Drs. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, penerbit M2S Bandung.

